

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : KEMANTREN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANANTO WIBOWO
2. Jabatan : MANTRI PAMONG PRAJA
3. NHK : 200157

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m²/104 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/40 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 46.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 150 R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 61.216.560**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 657.216.560**III. HUTANG** Rp. 121.225.318**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 535.991.242

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.